

BAB III

Kerangka Teoretis

A. Pengertian Kepemimpinan

Ketika membahas kepemimpinan akan berbicara antara lain mengenai perihal pemimpin, konsep kepemimpinan, dan mekanisme pemilihan pemimpin. Sebelum membicarakan lebih jauh soal kepemimpinan, ada baiknya dilakukan peninjauan terlebih dahulu definisi konsep pemimpin. Pendefinisian ini dapat membantu untuk memahami dan melakukan pembahasan menurut alur yang sistematis. Dalam bahasa Inggris pemimpin disebut dengan *leader*.¹ Kegiatannya disebut kepemimpinan atau *leadership*, namun dalam istilah Islam ada yang disebut dengan kata *khalifah* dapat diartikan juga sebagai “pengganti”. Pemakaian kata *khalifah* ini terjadi setelah Rasulullah SAW wafat, terutama bagi keempat khalifah (khalifah rasyidin). Disamping itu ada juga disebut bahwa pemimpin itu dengan istilah “amir” (yang jamaknya umara) ini diartikan dengan penguasa. Oleh karena itu secara spiritual kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, baik secara bersama-sama maupun perseorangan.²

Kepemimpinan (*leadership*) adalah kegiatan manusia dalam kehidupan. Secara etimologi, kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “pimpin” yang jika mendapat awalan “me” menjadi “memimpin” yang berarti menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing. Perkataan lain yang

¹Jhon M. Echols dan Hassan Syadilly, *Kamus Inggris Indonesia*. (Pontianak : Gajah Mada, University Press, 1993), h. 178

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*. Jakarta : Mahmud Yunus wadzuriyyah, 1989), h.120

sama pengertiannya adalah mengetuai, mengepalai, memandu dan melatih dalam arti mendidik dan mengajari supaya dapat mengerjakan sendiri. Adapun pemimpin berarti orang yang memimpin atau mengetuai atau mengepalai. Sedangkan kepemimpinan menunjukkan pada semua perihal dalam memimpin, termasuk kegiatannya.³

Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi *inter-personal*). Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apabila terdapat satu kelompok atau satu organisasi⁴

Sebenarnya kepemimpinan merupakan cabang dari ilmu administrasi⁵, khususnya ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial, dan merupakan salah satu perkembangan dari filsafat. Sedangkan inti dari administrasi adalah manajemen⁶. Dalam kaitannya dengan administrasi dan manajemen, pemimpinlah yang menggerakkan semua sumber-sumber manusia, sumber daya alam, sarana, dana waktu secara efektif-efisien

³ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 769

⁴ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu ?* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 5.

⁵ Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih berdasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lihat: *ibid.*, h. 11.

⁶ Manajemen adalah aktifitas dalam organisasi yang terdiri dari penentuan tujuan-tujuan (sasaran) suatu organisasi dan penentuan sarana-sarana untuk mencapai sasaran secara efektif. Lihat: *ibid*

serta terpadu dalam proses manajemen dalam suatu kelompok atau organisasi.. Keberhasilan suatu organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan yang ingin diraih, bergantung pada kepemimpinan seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan menduduki fungsi kardinal dan sentral dalam organisasi, manajemen maupun administrasi

Istilah Kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu *khilafah*, *imamah*, *imarah*, *wilayah*, *sultan*, *mulk* dan *ri'asah*. Setiap istilah ini mengandung arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan, yaitu *Khilafah*, *imamah* dan *imarah*.⁷ Oleh karena itu, pembahasan kepemimpinan dalam Islam akan diwakili oleh ketiga istilah ini.

a. *Khilafah*

Kata *khilafah* berasal dari kata *khalafa-yakhlifu-khalfun* yang berarti *al-'aud* atau *al-balad* yakni mengganti, yang pada mulanya berarti belakang. Adapun pelakunya yaitu orang yang mengganti disebut *khalifah* dengan bentuk jamak *khulafa*'⁸ yang berarti wakil, pengganti dan penguasa.⁹ Kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga bisa berarti seseorang yang diberi

⁷ Ketiga istilah ini merupakan bentuk kata yang menyatakan perihal dalam memimpin, sedangkan bentuk kata yang menunjuk pada pelakunya adalah *khalifah*, *imam* dan *amr*.

⁸ Al-Imam al-Allamah Abi Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram ibn Manzur al-Afriqi al-Misri (selanjutnya disebut al-Misri), *Lisan al-'Arab*, jilid IX (Beirut: Dar al-Sair, 1992), h. 82-83; Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: t.p., 1984), h. 390-391; Taufiq Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 21.

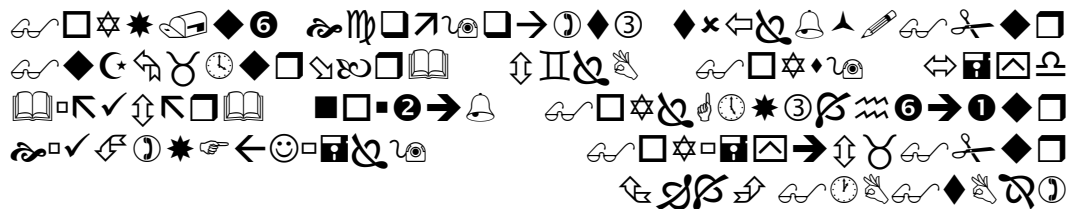
⁹ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (Magelang: Indonesiatara, 2001), h. 30.

wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang memberi wewenang.¹⁰ Menurut al-Ragib al-Asfahani, arti “menggantikan yang lain” yang dikandung kata *khalifah* berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan, baik orang yang digantikannya itu bersamanya atau tidak.¹¹

b. *Imamah*

Imamah berasal dari akar kata *amma-yaummu-ammun* yang berarti *al-qasdu* yaitu sengaja, *al-taqaddum* yaitu berada di depan atau mendahului, juga bisa berarti menjadi imam atau pemimpin (memimpin). *Imamah* di sini berarti perihal memimpin. Sedangkan kata *imam* merupakan bentuk *ism fa'il* yang berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk jamak dari kata *imam* adalah *a'immah*.¹² *Imam* juga berarti bangunan benang yang diletakkan di atas bangunan, ketika membangun, untuk memelihara kelurusannya. Kata ini juga berarti orang yang menggiring unta walaupun ia berada di belakangnya.¹³

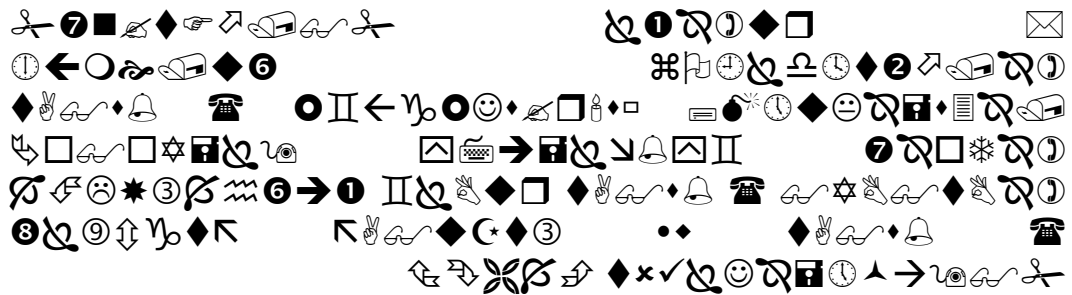
Dalam al-Qur'an, kata *imam* dapat berarti orang yang memimpin suatu kaum yang berada di jalan lurus, seperti dalam surat *al-Furqan*, ayat 74 yang berbunyi:



¹⁰ Taufiq Rahman, *op.cit.*, h. 22
¹¹ *Ibid.*
¹² Al-Misri, *op.cit.*, jilid XII, hlm. 22-26; Ahmad Warson Munawwir, *op.cit.*, hlm. 42-44; Taufiq Rahman, *op.cit.*, h. 39.
¹³ Al-Misri, *loc.cit.*; Ahmad Warson Munawwir, *loc.cit.*; Taufiq Rahman, *loc.cit.*

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."¹⁴

Selain itu dalam surat *al-Baqarah* ayat 124 dijelaskan sebagai berikut:



Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".¹⁵

Kata ini juga bisa berarti orang yang memimpin di jalan kesesatan, seperti yang ditunjukkan dalam surat *al-Taubah* ayat 12 yang berbunyi:



Artinya: Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-

¹⁴ Q.S. *al-Furqan*, ayat 74

¹⁵ Q.S. *al-Baqarah* ayat 124

orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.¹⁶

Dalam surat *al-Qasas*, ayat 41 Allah menjelaskan sebagai berikut:



Artinya: Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.¹⁷

Namun lepas dari semua arti ini, secara umum dapat dikatakan bahwa *imam* adalah seorang yang dapat dijadikan teladan yang di atas pundaknya terletak tanggung jawab untuk meneruskan misi Nabi SAW. dalam menjaga agama dan mengelola serta mengatur urusan negara.¹⁸

Term *imamah* sering dipergunakan dalam menyebutkan negara dalam kajian keislaman. Al-Mawardi mengatakan bahwa *imam* adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Ia memberi pengertian *imamah* sebagai lembaga yang dibentuk untuk menggantikan Nabi dalam tugasnya menjaga agama dan mengatur dunia.¹⁹ Sebagai tokoh perumus konsep *imamah*, ia menggagas perlunya *imamah*, dengan alasan, *pertama* adalah untuk merealisasi ketertiban

¹⁶ Q.S. *al-Taubah* ayat 12

¹⁷ Q.S. *al-Qasas*, ayat 41

¹⁸ Taufiq Rahman, *ibid.*, h. 42.

¹⁹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 3.

dan perselisihan. *Kedua*, berdasarkan kepada surat *al-Nisa'* ayat 59, dan kata *uli al-amr* menurutnya adalah *imamah*.²⁰



(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²¹

Adapun Taqiyuddin al-Nabhani menyamakan *imamah* dengan *khilafah*. Menurutnya, *khilafah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.²² Adapun al-Taftazani menganggap *Imamah* dan *Khilafah* adalah kepemimpinan umum dalam mengurus urusan dunia dan masalah agama.²³ Menurut Ibnu Khald}un, *imamah* adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat yang merujuk padanya. Oleh karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman

²⁰ Kamaruzzaman, *op.cit.*, h 41
²¹ Q.S. *al-Nisa'* ayat 59
²² *Ibid.*, h. 32.
²³ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattam (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 86.

kepada syariat.²⁴ Adapun penamaan sebagai imam untuk menyerupakannya dengan imam salat adalah dalam hal bahwa keduanya diikuti dan dicontoh.²⁵ Pada dasarnya teori *imamah* lebih banyak berkembang di lingkungan Syi'ah daripada lingkungan Sunni. Dalam lingkungan Syi'ah, *imamah* menekankan dua rukun, yaitu kekuasaan *imam (wilayah)* dan kesucian *imam ('ismah)*.²⁶ Kalangan Syi'ah menganggap *imamah* adalah kepemimpinan agama dan politik bagi komunitas muslim setelah wafatnya Nabi, yang jabatan ini dipegang oleh Ali bin Abi Talib dan keturunannya, dan mereka maksum.

Istilah ini muncul pertama kali dalam pemikiran politik Islam tentang kenegaraan yaitu setelah Nabi SAW. wafat pada tahun 632 M.²⁷ Konsep ini kemudian berkembang menjadi pemimpin dalam salat,²⁸ dan –setelah diperluas lingkupnya- berarti pemimpin religio-politik (*religious-political leadership*) seluruh komunitas Muslim, dengan tugas yang diembankan Tuhan kepadanya, yaitu memimpin komunitas tersebut memenuhi perintah-perintah-Nya.²⁹ Menurut Ali Syariati, tidak mungkin ada *ummah* tanpa *imamah*. *Imamah* tampak dalam sikap sempurna pada saat seseorang dipilih karena mampu menguasai massa dan menjaga mereka dalam stabilitas dan ketenangan, melindungi mereka dari ancaman, penyakit dan bahaya, sesuai dengan asas dan peradaban ideologis, sosial dan keyakinan untuk menggiring massa dan pemikiran mereka menuju bentuk

²⁴ Ibnu Khaldun, *op.cit.*, h. 159

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dawam Rahardjo, *op.cit.*, h. 475.

²⁷ Abdulaziz Sachedina, "Imamah", *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, II, h. 183

²⁸ Berasal dari sebuah akar kata yang berarti di depan, arti *imam* berkembang menjadi pemimpin dalam salat atau sembahyang. Lihat: Bernard Lewis, *op.cit.*, h. 44.

²⁹ *Ibid.*

ideal. Dalam pemikirannya mengenai *imamah* dan *khilafah*, Ali syariati menganggap *khilafah* cenderung ke arah politik dan jabatan, sedangkan *imamah* cenderung mengarah ke sifat dan agama.³⁰

c. *Imarah*

Imarah berakar kata dari *amara-ya'muru-amrun* yang berarti memerintah, lawan kata dari melarang. Pelakunya disebut *amir* yang berarti pangeran, putra mahkota, raja (*al-malik*), kepala atau pemimpin (*al-ra'is*), penguasa (*wali*). Selain itu juga bisa berarti penuntun atau penunjuk orang buta, dan tetangga. Adapun bentuk jamaknya adalah *Umara'*.³¹

Kata *amara* muncul berkali-kali dalam al-Qur'an dan naskah-naskah awal lainnya dalam pengertian "wewenang" dan "perintah". Seseorang yang memegang komando atau menduduki suatu jabatan dengan wewenang tertentu disebut *sahib al-amr*, sedangkan pemegang *amr* tertinggi adalah *amir*. Pada masa-masa akhir Abad Pertengahan, kata sifat *amiri* sering digunakan dalam pengertian "hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan atau administrasi". Sementara itu, di Imperium Turki, bentuk singkat kata ini adalah *miri*, dengan terjemahan bahasa Turki adalah *beylik*, menjadi kata yang umum digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, publik atau resmi. Kata *miri* juga digunakan untuk menunjukkan perbendaharaan kekayaan negara, kantor-kantor perdagangan pemerintah dan barang-barang milik pemerintah pada umumnya.³²

³⁰ Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, terj. Afif Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), h. 53.

³¹ Al-Misri, *op.cit.*, jilid XII, hlm. 26-31; Ahmad Warson Munawwir, *op.cit.*, h. 41-42.

³² Bernard Lewis, *op.cit.*, h. 47.

Seorang *amir* adalah seorang yang memerintah, seorang komandan militer, seorang gubernur provinsi atau –ketika posisi kekuasaan diperoleh atas dasar keturunan- seorang putra mahkota. Sebutan ini adalah sebutan yang diinginkan oleh berbagai macam penguasa yang lebih rendah tingkatannya, yang tampil sebagai gubernur provinsi dan bahkan kota yang menguasai wilayah tertentu di kota. Sebutan ini pula bagi mereka yang merebut kedaulatan yang efektif untuk diri mereka sendiri, sambil memberikan pengakuan simbolik yang murni terhadap kedaulatan *khalifah* sebagai penguasa tertinggi yang dibenarkan dalam Islam. Istilah *amir* ini pertama kali muncul pada masa pemerintahan 'Umar bin al-Khattab. Umar menyebut dirinya sebagai *amir al-mukminin* yang berarti pemimpin kaum yang beriman.

B. Bentuk Pola Kepemimpinan

Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Hal ini apabila dipilah-pilah maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan pola masing-masing.³³ Menurut Isjoni, dalam bukunya Manajemen Kepemimpinan dalam Pendidikan, tipe-tipe kepemimpinan antara lain:

1. Partisipatif

Kepemimpinan yang partisipatif adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan, bila ternyata proses tadi mempengaruhi kelompok, atau bila memang kelompok (bawahan) ini mampu turut berperan dalam pengambilan

³³ Veithzal Rivai dan Dedy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 36

keputusan dalam hal ini atasan tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka yang berinisiatif akan tetapi akan membantu mereka menyelesaikan tugas mereka sendiri, misal dengan memberikan fasilitas. Pemimpin di sini bermaksud untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bawahan dalam mencapai tujuan kelompok, organisasi atau lembaga, dengan menggunakan cara memberi pujian, atau juga memberikan kritik yang membangun walau pada akhirnya tanggung jawab untuk membuat keputusan itu ada ada tangan pemimpin namun dalam prosesnya, pengambilan keputusan itu dikerjakan bersama-sama dalam anggota kelompok.

2. Laisser faire (bebas)

Dengan cara ini seorang pemimpin akan meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahan. Disini pemimpin hanya sedikit saja atau hampir sama sekali tidak memberikan pengarahan. Sudah barang tentu dengan cara ini maksud pemimpin adalah menganggap bawahannya sudah dewasa, dan tau apa kewajibannya. Dalam cara ini komunikasi antar bawahan, maupun antara bawahan dengan pemimpinnya kurang sekali.³⁴

Dan setiap pemimpin memiliki karakteristik atau tipe kepemimpinan yang berbeda-beda antar satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Konsep seorang pemimpin pendidikan tentang kepemimpinan dan kekuasaan yang memproyeksikan diri dalam bentuk sikap kepemimpinan, sifat dan kegiatan yang dikembangkan dalam lembaga pendidikan yang akan dipimpinnya

³⁴ Isjoni, *Manajemen Kepemimpinan dalam Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 57-58

sehingga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut.

Bentuk-bentuk kepemimpinan sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tetapi disekolahun terdapat berbagai macam tipe kepemimpinan ini. Sebagai pemimpin pendidikan yang official leader, yang cara kerja dan cara bergaulnya dapat dipertanggungjawabkan dan bisa menggerakkan orang lain untuk turut serta mengerjakan sesuatu yang berguna bagi kehidupannya. Berdasarkan sifat dan konsep kepemimpinan maka Seokarto mengutarakan ada tiga tipe pokok kepemimpinan yaitu : tipe otoriter, tipe laissez faire dan tipe demokrasi.³⁵

a. Tipe Otoriter

Pada kepemimpinan yang otoriter, semua kebijakan dasar ditetapkan oleh pemimpin sendiri dan pelaksanaan selanjutnya ditugaskan kepada bawahannya. Semua perintah, pemberian tugas dilakukan tanpa mengadakan konsultasi sebelumnya dengan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin otoriter berasumsi bahwa maju mundurnya organisasi hanya tergantung pada dirinya.³⁶

b. Tipe Laissez Faire

Pada tipe "*laissez faire*" ini, pemimpin memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap anggota staf di dalam tata prosedur dan apa yang akan dikerjakan untuk pelaksanaan tugas-tugas jabatan mereka. Mereka

³⁵ Seokarto Indrafachrudi dkk, *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*, (Surabaya : Usana Offset Printing, 1983), h : 49. Lihat juga Maman Ukas, *Manajemen Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*, (Bandung : Ossa Promo, 1999), h : 262-263

³⁶ Mulyadi, *Kepemimpinan kepala sekolah*. (Malang : Uin Maliki Press, 2010), h. 45

mengambil keputusan dengan siapa ia hendak bekerjasama. Dalam penetapannya menjadi hak sepenuhnya dari anggota kelompok atau staf lembaga pendidikan itu. Apabila hal ini kita jumpai di sekolah, maka dalam hal ini bila akan menyelenggarakan rapat guru biasanya dilaksanakan tanpa kontak pimpinan, tetapi bisa dilakukan tanpa acara. Rapat bisa dilakukan selagi anggota/guru-guru dalam sekolah tersebut menghendakinya.³⁷

c. Tipe demokratis

Dalam tipe kepemimpinan ini seorang pemimpin selalu mengikut sertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan, kepala sekolah yang bersifat demikian akan selalu menghargai pendapat anggota/guru-guru yang ada dibawahnya dalam rangka membina sekolahnya. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai kepemimpinan yang demokratis, aktivitas pemimpin harus : a) Meningkatkan interaksi kelompok dan perencanaan kooperatif; b) Menciptakan iklim yang sehat untuk perkembangan individual dan memecahkan pemimpin-pemimpin yang potensial.³⁸

Hasil ini dapat dicapai apabila ada partisipasi yang aktif dari semua anggota kelompok yang berkesempatan untuk secara demokratis memberi kekuasaan dan tanggungjawab. Pemimpin yang demokratis tidak melaksanakan tugasnya sendiri. Ia bersifat bijaksana di dalam pembagian pekerjaan dan tanggung jawab. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab

³⁷Soetopo hendyat, dkk, *Kepemimpinan dan supervisi pendidikan*. (Malang : Bina Aksara, 1984), h.8

³⁸Ibid, h. 11

terletak pada pundak dewan guru seluruhnya, termasuk pemimpin sekolah. Ia bersifat ramah dan selalu bersedia menolong bawahannya dengan nasehat serta petunjuk jika dibutuhkan.³⁹

Menurut G. R. Terry yang dikutip Maman Ukas, bahwa tipe-tipe kepemimpinan ada 6, yaitu :

1. Tipe kepemimpinan pribadi (*personal leadership*). Dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan;
2. Tipe kepemimpinan non pribadi (*non personal leadership*). Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non pribadi baik rencana atau perintah juga pengawasan;
3. Tipe kepemimpinan otoriter (*authoritarian leadership*). Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati;
4. Tipe kepemimpinan demokratis (*democratic leadership*). Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan,

³⁹ Seokarto Indrafachrudi dkk, *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*, (Surabaya : Usana Offset Printing, 1983), h. 22

perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan;

5. Tipe kepemimpinan paternalistis (*paternalistis leadership*).

Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebabakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya;

6. Tipe kepemimpinan menurut bakat (*indogenous leadership*). Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya di mana ia ikut berkecimpung.⁴⁰

Secara garis besarnya penyusun dapat menyimpulkan bahwa tipe kepemimpinan dibagi menjadi tiga pola dasar, yakni :

- a. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas;
- b. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja sama;
- c. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang akan dicapai

C. Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat

⁴⁰ Maman Ukas, *Manajemen Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*, (Bandung : Ossa Promo, 1999), h. 261-262

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari Bahasa Inggris, *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Korten pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui redistribusi modal.⁴¹ Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Selain itu menurut Paul pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.⁴²

Sementara Hulme dan Turner berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga.

⁴¹ Maman Ukas, *Ibid*, h. 263

⁴² Delivery. *Pemberdayaan Masyarakat*. http://www.deliveri.org/guidelines/_policy/pg3/pg_3_sumary.htm, 2004.

Menurut Talcot Parsons kekuatan merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan kekuatan dalam pemberdayaan adalah daya, sehingga pemberdayaan dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.⁴³

Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan *powerlessness* (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri. Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer dari penelitiannya, yaitu:

1. Perkembangan konsep diri yang lebih positif;

⁴³ I.N.Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: Citra Utama, 2004),h. 35

2. Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis; dan
3. Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.

Grand Theories dari konsep pemberdayaan ini mengacu pada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai ada perbedaan kelas semisal majikan dan buruh, distribusi pendapatan yang tidak merata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan.

D. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.

E. Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto⁴⁴ pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi

⁴⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) h.59

ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Menurut *United Nations*, proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:⁴⁵

Getting to know the local community; Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

Gathering knowledge about the local community; Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

Identifying the local leaders; Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan atau tokoh-tokoh

⁴⁵ Edi Suharto, *Ibid*, h.68

masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "*the local leaders*" harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

Stimulating the community to realize that it has problems; Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

Helping people to discuss their problem; Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

Helping people to identify their most pressing problems; Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

Fostering self-confidence; Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

Deciding on a program action; Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program *action* tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

Recognition of strengths and resources; Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-

kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.⁴⁶

Helping people to continue to work on solving their problems; Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara berkelanjutan.

Increasing people ability for self-help; Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Ide menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Menurut Oakley dan Marsden, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.⁴⁷ Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

⁴⁶ Delivery. *Pemberdayaan Masyarakat*. <http://www.deliveri.org/guidelines/policy/pg3/pg3sumary.htm>, 2004

⁴⁷ Delivery. *Pemberdayaan Masyarakat*. <http://www.deliveri.org/guidelines/policy/pg3/pg3sumary.htm>, 2004

Menurut Kartasasmita, upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:⁴⁸

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.
3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

⁴⁸ Ginandjar Kartasasmita, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1997), h.19

F. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Sulistiyani⁴⁹ menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

G. Konsep Kepemimpinan Dalam Fiqih Siyasah

Kekuasaan di dalam islam memiliki tujuan menjamin tegaknya keadilan dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam merealisasikan tujuan tersebut Al-Qur'an meletakkan konsep dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan pemerintahan. Yaitu:

1. Penerapan Musyawarah

Musyawarah atau yang lebih dikenal dengan prinsip syura menurut Ar-Raghib Al-Asfahani adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat lain untuk mendapatkan satu pendapat yang disepakati.

⁴⁹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 83-84

syuro adalah salah satu prinsip penting tentang pemerintahan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini mengharuskan kepala negara dan pemimpin pemerintahan untuk menyelesaikan semua permasalahan masyarakat melalui musyawarah. Al-Quran bahkan mensejajarkan syura dengan menjalankan pilar-pilar Islam lainnya seperti iman, shalat, zakat. Allah Swt berfirman:

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
(Asy-syura: 38)

Kemudian, apakah hasil syuro mengikat penguasa? Pendapat yang paling kuat adalah hasil syura bersifat mengikat (*mulzimah*). Dalam pandangan Syaikh Abdul Qadir Audah, ada dua hal yang berkaitan dengan sifat mengikat hasil syuro bagi penguasa dan umat Islam:

- a. Membersihkan praktik diktatorisme dalam pemerintahan Islam.
- b. Pendapat mayoritas akan membentuk tanggung jawab umat secara kolektif dan sebagai bagian pendidikan politik untuk bersikap ilmiah, kritis namun memiliki komitmen

Secara umum, ketetapan syura dalam Al-Quran mencakup semua urusan kaum muslimin, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Namun Al-Quran hanya memberikan ketetapan-ketetapan yang bersifat

umum tentang syura dan tidak menyebut perincian-perincian mengenai pelaksanaannya dan persoalan dimana syura dilaksanakan. Ketiadaan perincian khusus ini menjadikan pelaksanaan syura menjadi fleksibel karena tidak dibatasi waktu dan dapat diterapkan dalam semua keadaan dalam masyarakat.

2. Persamaan Hak (Al-Musawah)

Persamaan derajat adalah bagian hak-hak individu dalam negara. Sayyid qutb menyebutnya sebagai asa keadilan dalam islam. Apabila umat manusia adalah anak keturunan Adam dan Islam memandang kesatuan asal usul ini memberikan implikasi adanya hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Allah Swt berfirman:

Artinya: Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.(al-isra': 70)

Prinsip-prinsip persamaan derajat dalam Islam mencakup:

a. Persamaan secara umum

Semua manusia sama dan sederajat dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka. Tidak ada keistimewaan yang diberikan atas satu orang dengan yang lainnya tanpa pengecualian. Artinya, setiap individu dalam negara memiliki semua hak, kebebasan, dan kewajiban yang juga dimiliki yang lain tanpa diskriminasi apapun,

baik ras, golongan, etnik maupun agama. Didalam konteks ini pula, kesetaraan ini mencakup pula persamaan hak an kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

b. Persamaan didepan hukum

Kepala negara dan rakyat pada umumnya memiliki kesedrajan di depan hukum. Kepala negara dalam islam tidak memilki kekebelan atau legitimasi kesucian teologis seperti halnya doktrin kristiani. Jika seorang kepala negara melakukan pelanggaran hukum, maka kepala negara dapat dihukum sebagaimana pelaku pidana lainnya di dalam peradilan biasa.

c. Persamaan hak-hak sosial

Dalam islam negara harus menjamin kesejahteraan kepada setiap keluarga baik alam kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama sesuai dengan bakat dan kemampuan.

3. Jaminan Hak Dan Kebebasan Berpendapat

Kebebasan merupakan pilar utama dalam pemerintahan islam. Apabila umat menjadi sumber legitimasi kekuasaan, maka kedaulatan kekuasaan tersebut tidak dapat diwujudkan tanpa adanya pilar-pilar kedaulatan dalam diri setiap umat. Kedaulatan ini mencakup juga adanya media untuk mengaktualisasi kedalatan tersebut. Akan tetapi, kebebasan dalam islam bukanlah berarti tanpa batas, karena kebebasan tanpa batas akan melahirkan kekacauan.

Imam Hasan Al-Banna menyebutkan kebebasan sebagai salah satu tuntutan Islam. Kebebasan itu mencakup kebebasan berideologi, menyampaikan pendapat, mendapatkan ilmu dan kebebasan kepemilikan. Syekh Muhammad Al-Ghazali menambahkan kebebasan dari kemiskinan, rasa takut, dan kebebasan untuk memerangi kezoliman.

4. Hak Dan Kewajiban Antara Pemimpin Dan Rakyat Serta Hubungan Timbal Baliknya

Sebagaimana yang sudah penulis katakan pada bab sebelumnya bahwa pemerintahan akan berjalan efektif jika penguasa menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya secara sempurna. Karena pemenuhan hak dan kewajiban yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat akan menghasilkan hubungan timbal balik yang positif bagi jalannya pemerintahan dan negara.

Adapun kewajiban seorang penguasa dan hak masyarakat seperti, memilih pejabat yang profesional, menetapkan hukum dengan adil, memberikan kebebasan berpendapat yang sesuai dengan konstitusi dan agama, dan menegakkan syariat. Sedangkan kewajiban masyarakat yang menjadi hak penguasa adalah taat dan percaya kepada penguasa